



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI BADAN KEUANGAN

2024

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu: prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi, Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Rencana Kerja. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Bukittinggi, Juli 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI



EGIE PRATAMA MULYA, S.STP, MA
NIP. 19850820 200412 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika penulisan Rencana Kerja.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
	3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah....	21
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V	PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Tahun 2022.....	7
Tabel 2.2	Matrik SWOT Badan Keuangan.....	15
Tabel 2.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	22
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Keuangan Kota Bukittinggi	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu: prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi, Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja Perangkat Daerah, oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun

sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan dengan demikian Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 akan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka tata cara dalam penyusunan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tata cara dan alur penyusunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan antara lain :

1. Renja disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,

Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, mengacu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2024;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan

Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024;

- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan. Badan Keuangan Kota Bukittinggi, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset-aset lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi.

Badan Keuangan dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, Badan Keuangan sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026, Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan untuk Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Badan Keuangan Tahun 2022

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	0	0	0	KEUANGAN									
5	2	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
5	2	2	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan penganggaran sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	2,0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang dihasilkan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	10 Buku	100%
5	2	2	2,0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	10 Buku	100%
5	2	2	2,0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA dan DPPA SKPD diverifikasi	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	100%	28 SKPD	28 SKPD	100%
5	2	2	2,0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	5 Perda	100%
						2. Perwako APBD	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako		1 Perwako	5 Perwako	
5	2	2	2,0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda PAPBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	5 Perda	100%
						2. Perwako PAPBD	2 Perwako	2 Perwako	2 Perwako	2 Perwako		2 Perwako	10 Perwako	
5	2	2	2,0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
5	2	2	2,0	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	2,0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen			600 Dokumen	3000 Dokumen	



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	2	2,0 2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	45 Laporan	100%
5	2	2	2,0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	100%	168 penyetoran PFK	1840 penyetoran PFK	100%
5	2	2	2,0 2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	7 Transaksi	7 Transaksi	7 Transaksi	7 Transaksi	100%	7 Transaksi	7 Transaksi	100%
						2. Jumlah transaksi kas daerah deposito	5 Transaksi	5 Transaksi	5 Transaksi	5 Transaksi		5 Transaksi	5 Transaksi	
5	2	2	2,0 2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	12 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	100%	12 Berita Acara	60 Berita Acara	100%
5	2	2	2,0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Perwako	-	1 Perwako	-	0%	1 Perwako	-	0%
5	2	2	2,0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji	2000 SP2D	2000 SP2D	2000 SP2D	2000 SP2D		2000 SP2D	10.000 SP2D	
5	2	2	2,0 3	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	2	2,03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	100%	28 SKPD	28 SKPD	100%
5	2	2	2,03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun	12 Informasi	12 Informasi	12 Informasi	12 Informasi	100%	12 Informasi	60 Informasi	100%
						2. Laporan Keuangan semester 1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
						3. Prognosis 6 bulan berikutnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
5	2	2	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	5 Perda	100%
						2. Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako	1 Perwako		1 Perwako	5 Perwako	
5	02	02	2,03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2,03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2,03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	2	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	30 Laporan	100%
5	2	2	2,04	0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2,04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	2	2	2,04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis perencanaan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	10 laporan	100%
5	2	2	2,04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	5 Tahun	100%
5	02	02	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem Terintegrasi	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	100%	6 Bidang Pengelolaan	6 Bidang Pengelolaan	100%
5	02	02	2,05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
5	2	3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	2,01	0	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	2,01	1	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	5 buku	100%
5	2	3	2,01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPMBMD	1 Buku 1 Buku	1 Buku 1 Buku	1 Buku 1 Buku	1 Buku 1 Buku	100%	1 Buku 1 Buku	5 Buku 5 Buku	100%
5	2	3	2,01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorarnya	145 orang	145 orang	145 orang	145 orang	100%	145 orang	145 orang	100%
5	2	3	2,01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	28 laporan	28 laporan	28 laporan	28 laporan	100%	28 laporan	140 laporan	100%
5	2	3	2,01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	10 sertifikat	-	10 sertifikat	-	100%	10 sertifikat	10 sertifikat	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	3	2,01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangankan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	10 Jenis	100%
						2. BMD yang diawasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
						3. BMD yang dapat dikendalikan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	
5	2	3	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah	29 penetapan status	29 penetapan status	29 penetapan status	29 penetapan status	100%	29 penetapan status	29 penetapan status	100%
						2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai		50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	
						3. Jumlah objek pemanfaatann aset	29 status pengalihan	29 status pengalihan	29 status pengalihan	29 status pengalihan		29 status pengalihan	29 status pengalihan	
						4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL		76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	
5	2	3	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	100%	2 Kali	10 Kali	100%
5	2	3	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	20 laporan	100%
5	2	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	2,01	0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru	10 Objek	10 Objek	10 Objek	10 Objek	100%	10 Objek	50 Objek	100%
5	2	4	2,01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi	10 Data Online	10 Data Online	10 Data Online	10 Data Online	100%	10 Data Online	10 Data Online	100%
5	2	4	2,01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	-	100%	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	100%
5	2	4	2,01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Pajak yang Ditetapkan	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPD N	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPD N	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPD N	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPD N	100%	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPD N	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPKDBT/SKPD N	100%
5	2	4	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	4	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	100%	10 Berita Acara	50 Berita Acara	100%
5	2	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	BB	A	BB	75%	A	A	100%
5	2	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	2	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	78 orang		78 orang	78 orang	100%	78 orang	78 orang	
5	2	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	25 orang	100%
5	2	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
5	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Piring, gelas, sendok tersedia	3 Jenis	0	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	46 jenis;	46 jenis;	46 jenis;	46 jenis;	100%	46 jenis;	46 jenis;	100%
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
						2. Barang cetakan keperluan kantor tercetak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan		12 Bulan	60 Bulan	
						3. Fotocopy dan penjiilidan terbayarkan	70.000 Lembar	70.000 Lembar	70.000 Lembar	... Lembar		70.000 Lembar	350.000 Lembar	
5	2	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Snack tamu	500 Porsi	500 Porsi	500 Porsi	500 Porsi	100%	500 Porsi	3.000 Porsi	100%
						2. Makanan ringan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	60 Bulan	



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3. Makan dan minum	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari		60 Hari	300 Hari	
						1. Perjalanan dinas terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
						2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia	12 Bualn	12 Bualn	12 Bualn	12 Bualn		12 Bualn	60 Bualn	
5	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnunjang Ursusan Pemerintah Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	-	100%	100%		100%	100%	
5	2	1	2,07	6	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tablet dan CCTV Tersedia	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
5	2	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia	150 lembar	150 lembar	150 lembar	150 lembar	100%	150 lembar	750 lembar	100%
						2. Paket pengiriman tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	5 Tahun	
5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
5	2	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
5	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharannya	39 unit	39 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	39 unit	100%
5	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
5	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	14 jenis	14 jenis	100%
						2. Jasa cleaning service tersedia	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang		4 orang	20 orang	



KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
						3. Retribusi sampah terbayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	60 bulan	
						4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung		1 gedung	1 gedung	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Kota Bukittinggi secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja Badan Keuangan, Indikator Kinerja badan didapatkan dari Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Pencapaian Indikator Kinerja Badan Keuangan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Kota Bukittinggi

No.	Indikator	SPM/Standar Pelayanan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	-	✓	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	13,33	18,73	19,86	20,53	
2.	Opini BPK	-	✓	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Capaian realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2021 dan 2022 kurang dari target yang diharapkan, tahun 2021 target sebesar 18,89 persen realisasi sebesar 13,33 persen, sedangkan untuk tahun 2022, target sebesar 21,91 persen, realisasi sebesar 18,73 persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2021 – 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari :

- H= Humanis
- E= Enterpreneurship
- B= Bijak
- A= Agamais/Adil
- T= Tauladan.

Sementara itu Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah merupakan ungkapan yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi tersebut. Artinya



falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur'an.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

Misi :

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi 2021-2026, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mendukung pelaksanaan Misi **Kelima** yaitu “HEBAT Dalam Tata Kelola Pemerintahan”, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi: Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Misi 5: Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Memban tu Walikota dalam melaksa nakan urusan pemerin tah dan tugas pemban tuan di bidang penunja ng urusan pemerin tah bidang keuanga n	1	Penetapan APBD belum sesuai jadwal yang ditetapkan;	1. Dinamika regulasi/perub ahan Kebijakan pemerintah pusat 2. Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	1. Peraturan perundang- undangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset 2. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.
		2	Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kota Bukittinggi		
		3	SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;		
		4	Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;		
		5	Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan		



Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tujuan 2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah Sasaran 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Sasaran 2. Meningkatnya Kontribusi PAD			Bank;		
		6	Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.		
		7	Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik.		
		8	Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun		
		9	Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;		
		10	Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;		
		11	Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.		
		12	Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;		
		13	Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai		
		14	Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan		
		15	Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual		
		16	Kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja		



Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		17	Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah		
		18	Belum optimalnya kualitas data potensi pajak daerah		
		19	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah		
		20	Belum optimalnya penegakan hukum dalam pengelolaan pajak daerah		
		21	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan		
		22	Jumlah piutang pajak tidak tertagih makin meningkat tiap tahunnya		

Berdasarkan telaahan terhadap Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Bukittinggi Tahun 2021-2026, Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang dijelaskan diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yang akan dipecahkan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Keuangan selama kurun waktu lima tahun, dimana pencapaiannya dibagi dalam rencana kerja Tahunan SKPD (Renja).

Adapun isu-isu strategis Badan Keuangan yang harus disikapi dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pada kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang kredible dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
2. Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai *best practice*, akurat, handal, terkini, dan mampu menyajikan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
3. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya, diharapkan tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.

4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah sehingga pendapatan transfer masih memberi kontribusi terbesar.
5. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pemungut pajak serta menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur (*business process*), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), serta komputerisasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa.

Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Pembangunan dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024:

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu

- (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- (4) penguatan daya saing usaha,
- (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta
- (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan menetapkan program-program kegiatan yang mendukung rencana kerja pembangunan tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha mewujudkan Visi “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, melalui Misi sebagai Berikut:

1. Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan;
2. Hebat dalam sektor pendidikan;
3. hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan;
4. Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni, budaya dan olahraga;
5. Hebat dalam tata kelola pemerintahan;
6. Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan
7. Hebat dalam sektor bidang pertanian

Badan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, untuk melaksanakan Misi ini perlu adanya kerangka yang jelas berupa Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Badan Keuangan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan pembangunan yang dirumuskan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan adalah

1. **Terwujudnya Pemerintahan yang bersih**, Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Indeks Integritas Pemerintah Daerah
2. **Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**,
Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan ini selanjutnya akan diturunkan dalam bentuk rumusan sasaran sehingga langkah-langkah atau strategi dan arah kebijakan dapat lebih terukur.

3.1.2 Sasaran

Untuk dapat memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,



maka selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan Jangka Menengah Badan Keuangan yaitu:

- 1. **Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah**, Indikator Kinerja Sasaran adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2. **Meningkatnya Kontribusi PAD**, Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun						Definisi Operasional
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tujuan 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	75	76	76	77	77	78	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi
2	Tujuan 2 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	Persentase PAD terhadap Pendapatan
3	Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9%	10%	11%	12%	13%	13%	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel diatas, target yang ditetapkan Badan Keuangan untuk Tujuan Kesatu, Sasaran Kesatu dan Indikator Kinerja Kesatu yaitu: Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP ditargetkan dari awal sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Indikator Kinerja kedua dari Tujuan Kedua dan Sasaran Kedua yang ditetapkan adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
 - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
 - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD yang dibawah ini disingkat R dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Target kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran kedua ini ditetapkan sebesar 8% diawal RPJMD dan 13% pada akhir tahun RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan adalah hasil perbandingan antara PAD yang dapat direalisasikan dengan jumlah seluruh pendapatan daerah pada satu tahun. Semakin tinggi persentase capaian berarti kinerja Badan Keuangan semakin *Baik*, demikian pula

sebaliknya jika semakin rendah maka kinerja di nilai *Kurang Baik*.

Pada Renstra 2021-2026 target capaian kinerja pada awal periode adalah 8% sedangkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD adalah 13%. Dalam menentukan targetnya ini, Badan Keuangan menempuh berbagai cara. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Melihat potensi wajib pajak daerah yang ada di wilayah Kota Bukittinggi
2. Pertumbuhan perolehan pajak daerah dimaksud dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan pajak daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesajahteraan masyarakat;
- b. Memusatkan tujuan/arrah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan system informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU dan DAK).

Program sebagai bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai dengan Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Badan Keuangan) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang

terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.586.789.413,00. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Keuangan Kota Bukittinggi disajikan dalam Tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KEUANGAN				30.586.789.413,00				40.535.991.875,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran 2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu 3. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu 4. Persentase penyerapan dana transfer 5. Persentase penyerapan belanja daerah 6. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP 7. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu 8. Pengelolaan Keuangan sesuai aturan 9. Sistem terintegrasi	BK	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Bidang Pengelolaan	12.865.013.692,00	APBD		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Bidang Pengelolaan	18.537.829.640,00
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS 2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan 3. Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran 4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember	BK	100%	1.190.203.292,00	APBD		100%	1.522.417.500,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BK	2	179.637.600,00	APBD		2	372.004.500,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BK	2	207.821.900,00	APBD		2	321.258.000,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BK	30	37.862.500,00	APBD		30	37.862.500,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BK	30	90.159.200,00	APBD		30	90.159.200,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BK	2	278.148.700,00	APBD		2	334.071.204,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BK	2	338.597.000,00	APBD		2	309.085.704,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BK	2	57.976.392,00	APBD		2	57.976.392,00
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda 2. Jumlah dana DAK yang dapat diserap 3. Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir 4. Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima 5. Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 6. Kontribusi optimalisasi kas	BK	100%	443.708.000,00	APBD		100%	1.139.754.000,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BK	1	43.403.000,00	APBD		1	68.250.000,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BK	12	19.999.900,00	APBD		12	47.250.000,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BK	4	88.556.600,00	APBD		4	288.750.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BK	12	41.541.600,00	APBD		12	68.250.000,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BK	2	32.959.700,00	APBD		2	73.500.000,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BK	1	32.487.100,00	APBD		1	116.004.000,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BK	1	24.652.700,00	APBD		1	131.250.000,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BK	30	160.107.400,00	APBD		30	346.500.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret 4. Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini	BK	100%	664.058.500,00	APBD		100%	1.248.658.140,00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BK	30	49.000.200,00	APBD		30	110.250.000,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BK	12	54.039.200,00	APBD		12	199.500.000,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BK	2	464.080.000,00	APBD		2	550.000.000,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BK	2	25.999.900,00	APBD		2	110.250.000,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BK	60	43.919.000,00	APBD		60	225.871.240,00
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BK	9	27.020.200,00	APBD		9	52.786.900,00
5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	BK	100%	10.500.620.000,00	APBD		100%	14.450.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	BK	1	9.500.620.000,00	APBD		1	9.450.000.000,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	BK	1	1.000.000.000,00	APBD		1	5.000.000.000,00
5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	BK	6 Bidang pengelolaan	66.423.900,00	APBD		6 Bidang pengelolaan	177.000.000,00
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	BK	1	66.423.900,00	APBD		1	177.000.000,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD 2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD 3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD	BK	100%	1.608.934.900,00	APBD		100%	3.063.892.044,00
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya 2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD 3. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtanggankan terhadap PAD	BK	100%	1.608.934.900,00	APBD		100%	3.063.892.044,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BK	1	69.034.100,00	APBD		1	168.360.000,00
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BK	2	9.505.700,00	APBD		2	126.500.000,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BK	30	1.196.636.400,00	APBD		30	2.070.000.000,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BK	1	22.782.400,00	APBD		1	21.390.000,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BK	12	145.347.300,00	APBD		12	220.800.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BK	12	12.963.300,00	APBD		12	110.000.000,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BK	12	151.636.100,00	APBD		12	256.961.264,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BK	30	1.029.600,00	APBD		30	89.880.780,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	BK	100%	1.619.553.400,00	APBD		100%	3.931.829.570,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	BK	100%	1.619.553.400,00	APBD		100%	3.931.829.570,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BK	1	50.265.800,00	APBD		1	500.801.180,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BK	1	24.414.000,00	APBD		1	84.649.200,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BK	3	78.050.100,00	APBD		3	78.050.200,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BK	12	136.281.000,00	APBD		12	886.803.180,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BK	1	305.198.700,00	APBD		1	305.220.612,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BK	7500	39.341.500,00	APBD		7500	168.899.800,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BK	1	166.910.400,00	APBD		1	308.899.200,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BK	12	679.127.200,00	APBD		12	1.380.000.000,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BK	12	108.505.900,00	APBD		12	108.506.198,00
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BK	1	31.458.800,00	APBD		1	110.000.000,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BK	A	14.493.287.421,00	APBD		A	15.002.440.621,00
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	BK	100%	17.627.100,00	APBD		100%	33.500.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BK	2	17.627.100,00	APBD		2	33.500.000,00
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	12.453.023.021,00	APBD		100%	12.425.013.321,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BK	78	12.453.023.021,00	APBD		78	12.425.013.321,00
5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	225.000.000,00	APBD		100%	368.101.200,00
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BK	1	225.000.000,00	APBD	-	1	368.101.200,00
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	865.186.000,00	APBD		100%	973.926.100,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BK	3	3.503.000,00	APBD		3	4.200.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BK	8	542.722.600,00	APBD		8	544.726.100,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BK	12	24.251.700,00	APBD		12	35.000.000,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BK	1	39.708.700,00	APBD		1	45.000.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BK	12	255.000.000,00	APBD		12	345.000.000,00
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	173.420.000,00	APBD		100%	209.400.000,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BK	1	2.000.000,00	APBD		1	2.400.000,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BK	12	171.420.000,00	APBD		12	207.000.000,00
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	759.031.300,00	APBD		100%	992.500.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BK	1	39.190.000,00	APBD		1	39.190.000,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BK	48	329.000.000,00	APBD		48	404.250.000,00
5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	BK	1	17.760.000,00	APBD		1	17.760.000,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BK	38	24.000.000,00	APBD		38	33.120.000,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BK	1	349.081.300,00	APBD		1	498.180.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan dengan mempedomani hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dalam menunjang Tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan dan sasaran instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR